

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Malang: UMMPress.
- Ali, M., and W. A. Hidayat. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Human Trafficking di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2: 152–162.
- Ali, Z. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ASEAN. 2015. *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Accessed January 2025. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ACTIP.pdf>.
- Dharossa, T., and T. Rezasyah. 2020. "Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014–2019)." *Padjadjaran Journal of International Relations* 2, no. 1: 105–118.
- Hanifah, I. 2020. "Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1: 10–23.
- Leo, R. P. 2024. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Nugroho, O. C. 2018. "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4: 543–556.
- Pattikale, C. A., C. W. Simatupang, Y. N. Sinaga, and A. D. Santi. 2025. "Peran Imigrasi Indonesia dalam Penanganan Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja: Perspektif Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang." *Hikamatzu Journal of Multidisciplinary* 2, no. 1.
- Permana, D., R. Adi, A. S. Wulandari, and D. Hikmatullah. 2025. "Peran Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada WNI Ilegal di Kamboja yang Menjadi Korban Perdagangan Orang." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 3: 1765–1774.
- Permatasari, I. A. 2020. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 1: 33–37.
- Rizkia, N. D., and H. Fardiansyah. 2023. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Penerbit Widina.

- Rosiyana, L., and A. Suherman. 2024. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban dalam Hukum Pidana Internasional untuk Mendorong Keadilan dan Pengakuan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4.
- Saputra, A., D. Natallia, S. Azlina, and S. Efendi. 2025. "Peran Imigrasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Nonprosedural di Kota Tanjungpinang Tahun 2025." *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik* 2, no. 4: 1007–1010.
- Suaib, H., A. S. R. Rakia, A. Purnomo, and H. M. Ohorella. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius.
- Sujatmoko, A. 2016. "Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2: 330–350.
- United Nations. 2000. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Accessed December 2024. <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>.
- Utomo, F. W., D. R. Insana, and E. C. Mayndarto. 2024. "Mekanisme Penipuan Digital pada Masyarakat Era 5.0 (Studi Kasus Penipuan Online Berbasis Lowongan Kerja Paruh Waktu yang Merebak di Masyarakat)." *Jurnal Ilmiah WUNY* 6, no. 1: 32–41.
- Veronika, S., O. Adhayanto, and I. Irman. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia dalam Kasus Penipuan Online Scam di Kamboja*. Doctoral diss., Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Widjaja, G., and H. Dhanudibroto. 2025. "Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 4, no. 7: 1323–1332.
- Yanggolo, M., C. J. Waha, and D. J. Paseki. 2024. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja." *Lex Administratum* 12, no. 4.

Peraturan dan Dokumen Resmi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Laporan Hasil Pemeriksaan:*

Perlindungan Korban TPPO di Indonesia. Accessed December 2024.

<https://peraturan.bpk.go.id>.

International Organization for Migration (IOM). 2024. *Trafficking for Forced Criminality in Southeast Asia's Online Scamming (Update December 2023)*.

Accessed February 2024.

https://roasiapacific.iom.int/sites/g/files/tmzbd1671/files/documents/2024-02/iom-southeast-asia-trafficking-for-forced-criminality-update_december-2023.pdf.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2025. "KBRI Phnom Penh Tangani 1.301 Kasus WNI Selama Jan–Mar 2025, Mayoritas Terkait Penipuan Daring/Online Scam." Accessed April 23, 2025.

<https://www.kemlu.go.id/berita/kbri-phnom-penh-tangani-1301-kasus-wni-selama-jan-mar-2025-mayoritas-terkait-penipuan-daring-online-scam>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 tentang *Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan*.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). 2023. "11 WNI di Kamboja Diduga Menjadi Korban Perdagangan Orang." Accessed June 19, 2023.

<https://sbmi.or.id/11-wni-di-kamboja-diduga-menjadi-korban-perdagangan-orang-sbmi-pertanyakan-komitmen-asean>.

Tirto.id. 2025. "Kasus TPPO WNI di Kamboja Naik 263 Persen, Pemerintah Diminta Perkuat Kerja Sama ASEAN." Accessed May 12, 2025. <https://tirto.id/kasus-tppo-wni-di-kamboja-naik-263-persen-g>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang *Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Keimigrasian*.